



Sebagian peserta Webinar Peringatan 10 Tahun Kepergian Asmara Nababan.

Searah jarum jam (dari kiri Magdalena Sitorus, Antonio Pradjasto, Stanley Yoseph Adi Prasetyo, Erasmus Napitupulu, dan Fatia Maulidiyanti.

Searah jarum jam (dari kiri) Sarah Lerry Mboeik, Pdt Gomar Gultom, Henry Saragih, Taufan Damanik.

Foto-foto: Analisa/j anto

# Asmara Berdemokrasi dan HAM

INI kisah tahun 1996. Saat itu gerakan menuntut pembaharuan agraria tengah gencar disuarakan kalangan aktivis organisasi masyarakat sipil di tanah air. Namun tuntutan itu, seperti unjuk rasa pedakadilan, dihadapi nekerasan, kadang dengan stigma. Tak terdiami di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Oleh: J Anto



Asmara Nababan

Dok. Keluarga

"Saya misalnya dicap PKI dan ditahan karena membela petani adat, namun kemudian dibebaskan berkat bantuan Bang As. Saya kenal Bang As pada 1992 di Kupang, saat ada acara evaluasi perencanaan di Yayasan Alpha Omega," tutur aktivis HAM dari Kupang, NTT, Sarah Lerry Mboeik (55).

Sejak 1990-an, ia aktif pembela hak-hak masyarakat adat. Kini ia adalah Direktur Pengembangan Inisiatif Advokasi Rakyat (PIAR-NTT) yang selain fokus pada persoalan HAM, juga isu antikorupsi. Menurutnya, pada 1990-an banyak muncul masalah di NTT.

Saat itu, ia bergabung sebagai staf di Yayasan Alpha Omega, bernaung di bawah gereja. Saat menyusun kegiatan evaluasi perencanaan kegiatan, berbagai masalah mengemuka dari para pendamping masyarakat.

Tak hanya isu kesenjangan pembangunan antara Indonesia bagian barat dan timur yang disolai, tapi juga kasus pencampuran tanah adat milik petani untuk kepentingan pengembangan area hutan tanaman industri, masalah kekerasan yang dialami masyarakat sipil dari aparat negara, korupsi, hingga buruknya representasi dalam partai politik.

Menurut Sarah, isu peningkatan kualitas dan kuantitas representasi dalam institusi politik dan lembaga demokrasi menguat pascareformasi 1998. Setelah prosedur demokrasi (pemilu) direformasi dan sejumlah lembaga demokrasi baru lahir, memperkuat proses demokratisasi di aneka bidang kehidupan.

Tak dipungkiri, di kalangan pejuang HAM, Asmara Nababan memang telah meninggalkan banyak legasi. Salah satunya dituturkan Marzuki Darusman, yang pernah sama-sama duduk di Komnas HAM bersama Asmara Nababan pada 2000. Menurut Marzuki, dalam perjuangan pemajuan HAM, Asmara memegang prinsip bahwa kepentingan satu orang setara dengan kepentingan kolektif. Namun di sisi lain Asmara bisa menerima adanya kepentingan nasional; sesuatu yang jarang diterima para pegiat LSM yang

organisasi-organisasi rakyat, mengembalikan gerakan advokasi ke gerakan politik yang tidak hanya berhenti pada perubahan kebijakan, tetapi juga ke perebutan kekuasaan.

Sarah sebenarnya pernah dibujuk agar maju dalam Pemilu 2004, namun ia menolak. Alasannya karena basis konstituen dianggap belum cukup kuat. Pada 2009 setelah berkolaborasi dan penguatan kapasitas, ia memutuskan ikut maju dalam Pemilu Legislatif dan DPD.

"Bang As yang memotivasi, mendampingi, dan memperkuat kapasitas politik saya selaku aktivis muda, hingga terpilih sebagai anggota DPD," ujarnya.

Bang As yang kerap disebut Sarah, tak lain adalah Asmara Nababan, tokoh pejuang demokrasi berbasis hak asasi manusia (HAM) yang meninggal dunia satu dekade lalu, tepatnya 28 Oktober 2010. Sarah hanya salah seorang aktivis masyarakat sipil yang pernah bersinggungan dengan pemikiran dan kiprah Asmara Nababan dalam usaha-usaha pemajuan demokrasi dan HAM di tanah air.

Nah, Selasa (8/12), menyambut peringatan Hari HAM sedunia, sejumlah organisasi nonpemerintah (ornop) yang bergerak di isu pemajuan demokrasi dan HAM, membuat webinar Peringatan 10 Tahun Kepergian Asmara Nababan. Tema yang dibahas, "Refleksi Satu Dasawarsa Gerakan Demokrasi dan HAM di Indonesia 2045".

Menghadirkan narasumber Ketua Umum PGI Pdt Gomar Gultom, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih, dan aktivis HAM asal Kupang, Sarah Lerry Mboeik. Koordinator Kontras, Fatia Maulidiyanti dan Direktur Eksekutif ICJR Erasmus Napitupulu selaku penanggap. Penyelenggaranya INFID, Perkumpulan Demos, Kontras, AJAR, KSPPM Prapat, Jaringan Kerja Lembaga Pelayanan Kristen (JKLPK), ELSAM, dan Oikumene.

Acara itu ditandai peluncuran buku *Meniti Ombak Mewujudkan Kemanusiaan, 10 Tahun Kepergian Asmara Nababan*. Buku itu menuliskan sumbangsih pemikiran Asmara Nababan dalam gerakan demokrasi berbasis HAM yang bersifat lintas isu. Buku diterbitkan ELSAM Jakarta dan disunting Yoseph Adi Prasetyo (Stanley).

Tak dipungkiri, di kalangan pejuang HAM, Asmara Nababan memang telah meninggalkan banyak legasi. Salah satunya dituturkan Marzuki Darusman, yang pernah sama-sama duduk di Komnas HAM bersama Asmara Nababan pada 2000. Menurut Marzuki, dalam perjuangan pemajuan HAM, Asmara memegang prinsip bahwa kepentingan satu orang setara dengan kepentingan kolektif. Namun di sisi lain Asmara bisa menerima adanya kepentingan nasional; sesuatu yang jarang diterima para pegiat LSM yang

sudah tidak bisa melihat lagi batas-batas nasional.

Ketua Komnas HAM, Taufan Damanik, yang juga dikenal sebagai aktivis masyarakat sipil di Sumut, menyebut Asmara Nababan sebagai tokoh anutan ornop muda seangkatannya. Pada 1980-an, di tengah represi negara (orde baru) terhadap aktivis masyarakat sipil yang tengah memperjuangkan hak-hak rakyat, Asmara Nababan berani tampil di depan.

Ia misalnya membela hak-hak masyarakat Desa Sugapa, Tapanuli Utara berhadapan dengan kekuatan korporasi modal swasta yang didukung aparat keamanan. Ia tak takut menghadapi risiko ancaman, intimidasi, dan teror. Komitmen dan pemikirannya tentang HAM juga tetap hidup di Komnas HAM.

Henry Saragih menyebut, pikiran, sikap, dan kepedulian Asmara dalam gerakan demokrasi dan HAM telah mengilhami munculnya berbagai gerakan sosial di Indonesia. Namun jelang satu abad usia negara dan bangsa pada 2045, perjuangan gerakan demokrasi dan HAM dihantui rasa cemas akibat praktik-praktik kekerasan dari negara dan yang terjadi antarmasyarakat.

Dalam istilah Pdt Gomar Gultom, Indonesia kini tengah mengalami tegangan-tegangannya sehingga membuat upaya pemajuan, penegakkan, dan perlindungan HAM dalam sepuluh tahun setelah kepergian Asmara Nababan, masih berlari-lari di tempat.

Dalam perspektif Fatia Maulidiyanti dari Kontras, ruang kebebasan sipil dinilai makin menyempit. Sejumlah anak muda yang dianggap telah mencemarkan nama baik dihukum lewat UU ITE, *polisi cyber* diintensifkan, dan anak-anak muda yang bersikap kritis diberi berbagai stigma.

Menurut Gomar Gultom, sebenarnya rezim HAM, dari sisi regulasi, tergolong sudah lumayan bagus, terutama sejak amandemen ke-4 UUD 1945. Berbagai institum hukum internasional, seperti hak sipil, ekososbud, antidiskriminasi juga sudah diratifikasi oleh pemerintah.

Meski begitu, di tataran realitas, menurutnya, situasinya memang tak terlalu mengembirakan. Ia menyebut masih ada *ekstra judicial killing* di Papua, kebebasan beragama masih bermasalah, agama lokal juga terabaikan.

"Yang membahayakan, negara seringkali absen saat berhadapan dengan tekanan kelompok masyarakat, yang saya sebut mobokrasi," katanya. Bahkan ada kesan seolah negara takut dan enggan. Padahal kekuatan mobokrasi juga mengancam HAM orang lain, di samping meruntuhkan wibawa negara.

Ketua PGI itu juga menyinggung soal utang pelanggaran HAM berat masa lalu dan kecenderungan konflik agraria yang sering menguntungkan pemodal. Ia menengarai, semua itu terjadi akibat

kesadaran dan perspektif HAM masyarakat masih sangat rendah. Terlebih di kalangan penyelenggara negara dan pimpinan agama yang masih meminggirkan HAM.

"Di masyarakat juga ada pandangan legal fetisisme, yang menganggap hukum dapat menyelesaikan segalanya. Seolah jika sebuah produk hukum sudah dibuat, sudah cukup," katanya. Ia juga menyebut soal demokrasi prosedural yang masih jauh dari nilai dasar demokrasi dan munculnya sikap beragama yang cenderung formalistik dan dogmatis.

**Memperjuangkan HAM**  
Namun dalam perspektif gerakan oikumene, pengabaian HAM sebenarnya bukan hal baru. Sudah jadi masalah klasik era kehidupan masyarakat Israel kuno seperti terdapat dalam Kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru.

Perspektif gerakan oikumene terhadap perjuangan demokrasi dan HAM itu bersumber dari ajaran bahwa saat berhadapan dengan Tuhan, manusia adalah *imago dei* (gambar Allah). Artinya manusia punya martabat dan di dalam dirinya ada keilahan tertentu. Karena itu memperlakukan manusia harus sama seperti saat manusia memperlakukan Tuhan. Sebaliknya menciderai kemanusiaan sama dengan menciderai Allah sendiri.

Namun di tengah kesempurnaan manusia sebagai *imago dei*, berkembang juga ketidakberdayaan manusia akibat dosa. Karena itu bagi gerakan oikumene, pelanggaran dan pengabaian HAM terjadi akibat dosa. Tetapi Tuhan lalu memberi anugerah berupa pengampunan dosa. Pengampunan ini memberi kemungkinan baru bagi manusia berdosa untuk lebih sempurna lagi dalam memperjuangkan kemanusiaan yang lebih bermartabat.

"Perjuangan penegakkan HAM, bagi gerakan oikumene adalah perjuangan untuk menghargai martabat manusia sebagai *imago dei*," ujar Pdt Gomar Gultom. Oikumene itu sendiri artinya rumah dunia yang nyaman. Itu sebabnya, gerakan oikumene selalu mengupayakan dunia yang nyaman untuk didiami semua orang dari berbagai latar belakang etnis, agama, dan latar belakang sosial, untuk memperoleh kesetaraan, kejujuran, kesejahteraan, keadilan, dan kebebasan manusia.

"Saat bersama kami, Bang As selalu menekankan bahwa gerakan perjuangan penegakkan HAM adalah perjuangan untuk memperbaiki *imago dei*," ujarnya.

Itu sebabnya, sepanjang hidup perjuangan HAM yang dilakukan Asmara Nababan pada hakikatnya adalah perjuangan untuk memulihkan martabat kemanusiaan. Asmara berdemokrasi dan HAM, sejatinya tak pernah luruh ditelan waktu karena itulah kesetiaan keberadaan manusia sebagai *imago dei*, meski Asmara Nababan sendiri telah pergi mendahului kita.

## Legasi Asmara Nababan

"KARENA kau menulis, suaramu tak akan padam ditelan angin, akan abadi, sampai jauh di kemudian hari."  
Yang dikatakan sastrawan besar Indonesia, Pramoedy Ananta Toer, merepresentasikan nawaitu penerbitan buku *Meniti Ombak Mewujudkan Kemanusiaan, 10 Tahun Kepergian Asmara Nababan*.

Dalam istilah Antonio Pradjasto, saat membuka webinar Peringatan 10 Tahun Kepergian Asmara Nababan, Refleksi Gerakan Demokrasi dan HAM 2045, Selasa (8/12), penulisan dan penerbitan buku tersebut tidak dimaksudkan untuk merayakan kematian melainkan kehidupan.

"Kehidupan dari praktik-praktik berkeyakinan, beragama, berelasi, dan hidup merdeka dari seorang aktor melalui berbagai kisah para sahabat maupun kolega," ujarnya. Kolega yang dimaksud adalah para perajut solidaritas, inklusifitas, mereka yang memihak orang-orang miskin, marginal, maupun yang bergerak dibidang spiritualitas pembebasan sebagai bagian dari praktik-praktik HAM.

Mereka adalah orang-orang yang pernah bersinggungan dengan Asmara Nababan, salah seorang tokoh pemikir dan pejuang HAM terkemuka di tanah air. Meski mengambil legasi pemikiran yang diwariskan Asmara Nababan, namun menurut isteri almarhum Asmara Nababan, Magdalena Sitorus, penulisan buku tersebut

bukan dalam kerangka mengulstuskan Asmara Nababan.

"Semata membicarakan tentang kemungkinan untuk mengenang warisan kenangan dan pemikirannya," ujarnya.

Mengenang berpijak pada momentum hari bersejarah Sumpah Pemuda, dengan pendekatan untuk mendalami gerakan demokrasi dan HAM di masa lalu, masa kini, dan masa depan, karena dua hal itulah yang menyatu dalam kehidupan Asmara Nababan sampai akhir hayatnya.

Sejumlah refleksi bagian kedua buku yang ditulis sejumlah aktivis lintas isu.  
Bagian ini ditulis oleh Josef Purnama Widyatmadja, Roichatul Aswidah, Usman Hamid, Mohammad Choirul Anam, Ihdhal Kasim, Agung Putri Astrid, Galuh Wandita, J Danang Widoyoko, Al Araf, Stanley Adi Prasetyo, Kamala Chandrakirana, Rainy MP Hutabarat, Sandrayati Moniaga, Delima Silalahi, Sofia Maleak de-Haan, Amin Siahaan, dan Elga Joan Sarungup.

kumpulan kenangan yang ditulis orang-orang yang pernah dekat dengan Asmara. Mereka adalah teman, sahabat, kolega, rekan kerja, hingga anak muda yang pernah bekerja satu tim dengan Asmara.

Para penulis antara lain, Saparinah Sadli, Remy J Leimana, Zoemrotin K Susilo, Augustinus Rumanara, Lena Simanjuntak-Mertes, Soekirman, Wahyu Susilo, Sugeng Bahagijo, Pardamean Ronitua Harahap, dan Gomar Gultom.

Dalam peta gerakan sosial di Indonesia, Asmara Nababan merupakan tokoh kunci di belakang sejumlah organisasi yang dikenal berada di garda depan gerakan demokrasi dan HAM, seperti ELSAM, JKLPK, Demos, Kontras, dan sejumlah organisasi lainnya.

Sedang isu-isu yang menjadi area perjuangan-nya, antara lain tentang kemandirian Komnas HAM, melawan impunitas, keadilan transisional, rekonsiliasi, pertanggungjawaban pelanggaran HAM masa lalu, pemberantasan korupsi, militerisme, kebebasan pers, politik gender, hal penyandang disabilitas, masyarakat adat, gerakan petani dan penguatan gerakan masyarakat sipil, hingga penguatan agama untuk membangun demokrasi.

Berbagai legasi itu dapat diunduh dari versi digital buku *Meniti Ombak Mewujudkan Kemanusiaan*, pada link <https://asmaranababan.org/warisan-pemikiran>. Dalam link tersebut dapat juga diunduh biografi *Asmara Nababan: Oase Bagi Setiap Kegelesahan*. (J Anto)

